TEORI FUNGSIONALISME DILIHAT DARI SUDUT PANDANG ANTROPOLOGI HUKUM

Anastasya Salsabila
Email: anastasya.salsabila11@gmail.com
No BP: 2110003600279
Universitas Ekasakti Padang

A. PENDAHULUAN

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena ilmiah. Menurut salah satu ahli yakni Siswoyo "Dalam Mardalis, 2003:42" Teori diartikan sebagai seperangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan dan mencerminkan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antar variabel, dengan tujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena.

Teori fungsionalisme sama dengan fungsionalisme struktural yaitu sebuah sudut pandang luas yang mencakup dan termasuk kedalam sosiologi dan juga antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan seperti membayar pajak, dimana pajak dikeluarkan untuk kepentingan bersama baik infrastruktur ataupun ekonomi.

Antropologi hukum merupakan kajian antropologis terhadap makna sosial berdasarkan pentingnya aturan untuk mempelajari cara aturan terlaksana termasuk hal mengenai konteks sosial pembuatan aturan tersebut, cara aturan mempertahankan dan membarui institusi sosial lainnya, dan langkah aturan menciptakan konduite sosial. Tetapi seiring perkembangan zaman

dan tatanan politik global setelah Perang Dunia, cakupan kajian antropologi aturan meluas pada antaranya membahas keterkaitan antara pertarungan sosial menggunakan kesenjangan ekonomi serta batasan-batasan aturan pada melakukan rekayasa sosial. Antropologi hukum saat ini turut mempelajari interaksi antara politik dan aturan yang mengalami perubahan terhadap konteks setelah Perang Dunia tersebut. Sebagai dampak berdasarkan ekspansi cakupan tersebut, bahkan terdapat kalangan yang menyebut kajian antropologi hukum dalam abad ke-19 menjadi kajian antropologi protolegal.

Setiap hal memiliki manfaat termasuk mempelajari antropologi hukum. Antropologi Hukum memiliki manfaat untuk mengetahui deskripsi bentuk hukum sebagai pengendali sosial yang dilatarbelakangi oleh budaya selain itu juga mengetahui suku bangsa atau masyarakat mana yang memiliki aturan-aturan sikap hukum yang sudah tinggi dan yang belum tinggi. Antropologi hukum memandang masyarakat secara dinamis, sehingga peranan sosial dan hukum tidak terbatas mempertahankan status. Dimana antropologi hukum termasuk ilmu yang empiris yaitu ilmu yang didasarkan atas observasi terhadap kenyataan, penggunaan akal sehat, dan hasilnya tidak spekulatif.

B. PEMBAHASAN

Robert King Merton (biasa disingkat Robert K. Merton) merupakan salah satu ilmuwan yang sering dianggap lebih ahli teori dari lainnya, Robert K. Merton membawakan perkembangan pada teori fungsionalisme struktural melalui pernyataan mendasar dan jelas, meskipun dalam perkembangan keilmuan Robert K. Merton terdapat ilmuwan lain yang ikut serta memberikan sumbangsihnya, seperti Talcot Parson, P.A. Sorokin, L.J. Henderson, E.F. Gay,

George Sarton, Emile Durkhem dan George Simmel. Robert K. Merton pertama kali mengembangkan paradigmanya pada tahun 1948 untuk merangsang peneliti untuk menggunakan teori fungsionalisme struktural. Apa yang ia tawarkan segera menjadi model bagi perkembangan teori-teori yang secara ideal menyatu dengan penelitian sosiologis fungsionalisme struktural ini.

Robert K. Merton menulis sejumlah pernyataan terpenting tentang fungsionalisme struktural dalam sosiologi. Robert K. Merton juga mengkritisi beberapa aspek ekstrem dan kukuh dari fungsionalisme struktural. Namun, sama pentingnya pandangan teoritis barunya membantu memberikan manfaat secara terus-menerus kepada fungsionalisme struktural. Robert K. Merton mengkritik apa yang dilihatnya sebagai tiga postulat dasar analisis fungsional seperti yang dikembangkan oleh antropolog Malinowski dan Radcliffe Brown.

Pertama adalah postulat kesatuan fungsional masyarakat, suatu keadaan dimana dari sistem sosial bekerja sama postulat ini berpendirian bahwa “semua keyakinan dan praktek kultural dan sosial yang sudah baku adalah fungsional untuk masyarakat sebagai satu-kesatuan mandalam satu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang menandai, tanpa menghasilkan konflik yang berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau di atur”. Robert K. Merton menegaskan bahwa kesatuan fungsional yang sempurna dari suatu masyarakat adalah bertentangan dengan fakta. Hal ini disebabkan karena dalam kenyataannya dapat terjadi fungsional bagi individu dalam masyarakat tertentu, akan tetapi terjadi disfungsi bagi individu dalam masyarakat lain. Robert K. Merton menegaskan bahwa disfungsi (elemen disintegratif) tidak boleh diabaikan hanya karena orang begitu terpesona oleh fungsi-fungsi positif. Ia juga menegaskan apa yang fungsional bagi suatu kelompok dapat tidak fungsional bagi keseluruhan, oleh karena itu batas-batas kelompok yang dianalisa harus terperinci.

Postulat kedua fungsionalisme universal, berkaitan dengan postulat pertama. Fungsionalisme universal menganggap bahwa “seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif”. Sebagaimana sudah kita ketahui, Robert K. Merton memperkenalkan konsep difungsi maupun fungsi positif. Beberapa perilaku sosial jelas bersifat disfungsional. Robert K. Merton menganjurkan elemen-elemen kultural seharusnya dipertimbangkan menurut kriteria keseimbangan konsekuensi-konsekuensi fungsional (bet balance of functional consequences), yang menimbang fungsi positif terhadap fungsi negatif.

Postulat ketiga adalah postulat indispensability, menyatakan bahwa “dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, obyek materil, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan, dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan”. Menurut Robert K. Merton postulat ini masih kabur. Belum jelas apakah fungsi (suatu kebutuhan sosial, seperti reproduksi anggota-anggota baru) atau item (seperti norma, seperti keluarga batih) merupakan suatu keharusan. Pendapat Robert K. Merton adalah bahwa seluruh postulat fungsional tersebut bersandar pada pernyataan nonempiris yang disandarkan pada teoretis abstrak. Tentunya ini akan menjadi tanggung jawab sosiolog baru untuk menelaah setiap postulat tersebut secara empiris. Keyakinan Robert K. Merton adalah bahwa uji empiris, bukan pernyataan teoretis, adalah sesuatu yang krusial bagi analisis fungsional. Ini adalah salah satu yang mendorong Robert K. Merton untuk mengembangkan paradigma analisis fungsional sebagai panduan kearah pengintegrasian teori dan riset. Asumsi teori fungsionalisme struktural bertumpu pada hakikat manusia dan masyarakat. Masyarakat dianggap terdiri dari bagian-bagian yang secara teratur saling berkaitan. Walaupun skema paradigma Robert K. Merton merupakan penyempurnaan dari fungsionalisme yang lebih awal, tetapi dia masih tetap saja menekankan kesatuan, stabilitas dan

harmoni sistem sosial. Fungsionalisme struktural tidak hanya berlandaskan pada asumsi-asumsi tertentu tentang keteraturan masyarakat, tetapi juga memantulkan asumsi-asumsi tertentu tentang hakikat manusia. Di dalam fungsionalisme, manusia diperlakukan sebagai abstraksi yang menduduki status dan peranan yang membentuk lembaga-lembaga atau struktur-struktur sosial. Di dalam perwujudannya yang ekstrim, fungsionalisme struktural secara implisit memperlakukan manusia sebagai pelaku yang memainkan ketentuan-ketentuan yang telah dirancang sebelumnya, sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan masyarakat. Konsepsi Robert K. Merton tentang masyarakat berbeda dari konsepsi Emile Durkheim sebagai sesepuh analisa fungsionalisme struktural, Menurut Robert K. Merton, masyarakat selalu berbeda posisi. Masyarakat adalah nilai yang memiliki fungsi yang berbeda. Penempatan sosial didalam masyarakat seringkali menjadi masalah karena suatu posisi, seperti halnya yaitu yang pertama adalah posisi tertentu lebih menyenangkan dari pada posisi yang lain. Masyarakat keatas itu posisinya yaitu stratifikasi, sedangkan masyarakat kesamping itu posisinya yaitu diferensiasi. Kedua posisi tersebut tidak merujuk kepada perebutan tetapi kepada tujuan karena tujuan itu sangat penting. Yang kedua adalah posisi tertentu lebih penting untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat dari pada posisi lainnya. Fungsional adalah setiap posisi-posisi selalu menjalankan fungsinya. Fungsional struktural adalah hubungan timbal balik. Dan yang terakhir (ketiga) adalah posisi-posisi sosial yang berbeda memerlukan bakat dan kemampuan yang berbeda pula. Posisi tersebut harus sesuai dengan harapan masyarakat. Model struktur fungsional dari sudut pandang Robert K. Merton menjelaskan bahwa analisis structural memusatkan perhatian pada kelompok sosial, organisasi, masyarakat dan kebudayaan. obyek apapun yang dapat dianalisis secara struktural fungsional harus mempresentasikan unsur-unsur standar (yaitu yang terpola dan berulang). Ia menyebut hal tersebut sebagai peran sosial, pola-pola institutional, proses sosial, pola-pola cultural, emosi yang

terpola secara cultural, norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, alat control sosial dan lain sebagainya. Teori fungsionalisme struktural memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang teratur yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain, di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Bila terjadi perubahan pada satu bagian akan menyebabkan ketidak seimbangan dan dapat menyebabkan perubahan pada bagian lainnya. Teori ini berpandangan bahwa masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi memiliki peran masing-masing, peran yang bekerja adalah demi berfungsinya pada bagian-bagian yang lain. Sebagaimana analogi umum yang dipopulerkan Herbert Spencer menampilkan bagian-bagian masyarakat ini sebagai "organ" yang bekerja demi berfungsinya seluruh "badan" secara wajar. Teori fungsionalisme struktural Robert K. Merton adalah menekankan kepada keteraturan (order) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifes dan keseimbangan (equilibrium). Menurut teori ini bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Masyarakat terdiri dari kumpulan individu-individu membentuk kelompok sosial, organisasi, dan lembaga institusi tiada lain yaitu untuk mencapai keseimbangan sosial. Para fungsionalis struktur bermula pada hal yang dicenderung lebih memusatkan perhatiannya pada fungsi-fungsi sebuah struktur atau institusi.

Masyarakat atau kelompok sosial tercipta tentunya berangkat dari pengharapan besar yang tertanam dalam diri individu secara khusus, kelompok sosial secara umum. Mereka dalam masyarakat dapat membuktikan perkembangannya melalui realita sosial yang merupakan hasil olahan secara bersama (tujuan) maupun muncul dari individu itu sendiri.

C. PENUTUP

Robert King Merton (biasa disingkat Robert K. Merton) merupakan salah satu ilmuwan yang sering dianggap lebih ahli teori dari lainnya, Robert K. Merton membawakan perkembangan pada teori fungsionalisme struktural melalui pernyataan mendasar dan jelas. Robert K. Merton mengkritik apa yang dilihatnya sebagai tiga postulat dasar analisis fungsional seperti yang dikembangkan oleh antropolog Malinowski dan Radcliffe Brown. Pertama adalah postulat kesatuan fungsional masyarakat. Postulat kedua fungsionalisme universal, berkaitan dengan postulat pertama. Fungsionalisme universal menganggap bahwa “seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif”. Postulat ketiga adalah postulat indispensability, menyatakan bahwa “dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, obyek materil, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan, dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan”. Menurut Robert K. Merton, masyarakat selalu berbeda posisi. Masyarakat adalah nilai yang memiliki fungsi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 201. <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of Law, Volume 4, Nomor 3, 2017. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.
- Laurensius Arliman S, Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Supremasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018. <http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v1i01.102> .

- Laurensius Arliman S, Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia, *Ensiklopedia of Journal*, Volume 1, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18>.
- Laurensius Arliman S, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, *Kertha Patrika*, Volume 39, Nomor 3, 2017, <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>.
- Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 12, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5>.
- Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, *Dialogica Jurnalica*, Volume 11, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.
- Laurensius Arliman S, Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, *UIR Law Review*, Volume 2, Nomor 2, 2018, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1587](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1587).
- Laurensius Arliman S, Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, *Doctrinal*, Volume 1, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, Ni Putu Eka Dewi, *Protection of Children and Women's Rights in Indonesiathrough International Regulation Ratification*, *Journal of Innovation, Creativity and Change* Volume 15, Nomor 6, 2021.
- Laurensius Arliman S, *Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme*, *Jurnal Yuridis*, Volume 3, Nomor 2, 2016, <http://dx.doi.org/10.35586/v3i2.180>.
- Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, *Jurnal Ensiklopedia Sosial Review*, Volume 2, Nomor 3, 2020..